

**KEBEBASAN PERS DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI
BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Bidang Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh

DEVI ALVIANA
NIM. 01154002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Alviana
NIM : 01154002
Tempat, Tgl. Lahir : Malaysia, 21 Agustus 1995
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Alamat : Desa Benteng Tellu'E, Dusun Kampung Lampe,
Kecamatan Amali, Kabupaten Bone
Judul : Kebebasan Pers dalam Menyampaikan Informasi
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 Tentang Pers

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 14 Januari 2022

Penulis,



DEVI ALVIANA
NIM. 01154002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Devi Alviana, NIM: 01154002 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Kebebasan Pers dalam Menyampaikan Informasi Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”** menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 21 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. ANDI SUGIRMAN, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002



IMRON RIZKI A, S.H., M.H.
NIP. 199103102018011002




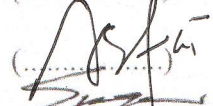
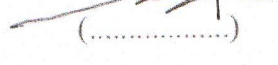
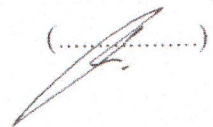
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Kebebasan Pers dalam Menyampaikan Informasi Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers*” yang disusun oleh Saudari **Devi Alviana**, NIM: 01.15.4002, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 21 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir 1443 H*, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*).

Watampone, 13 Juni 2022 M
13 Dhu’l-Qi’dah 1443 H


DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.
Munāqisy I : Syawaluddin Hanafi, S.H.I.,M.H.
Munāqisy II : A. Sultan Sulfian, M.H.
Pembimbing I : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
Pembimbing II : Imron Rizki A, S.H.,M.H.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone


Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah (skripsi) ini. Alhamdulillah. Tidak lupa kita kirimkan shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu.

Karya tulis ilmiah (skripsi) ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengalami banyak hambatan, Alhamdulillah dengan bantuan pembimbing, saran, nasihat dan kerjasama dengan berbagai pihak peneliti bisa menaklukkan hambatan yang dihadapi dan tentu juga dengan izin Tuhan Yang Maha Esa peneliti bisa sabar dan tangguh dalam mengatasi hambatan yang dialami.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, didikan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak saya Marhadi, ibu saya Hj. Amirah dan tante saya Nursia. Terimakasih penulis ucapkan atas dorongan dan pengertiannya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiyahnya (skripsi).
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum, selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd.I. Wakil Rektor II Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI. Wakil Rektor III

Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. yang senantiasa meningkatkan kualitas mahasiswa IAIN Bone.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Ibu Rosita, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Syariah dan Hukum Islam. Terima kasih penulis ucapkan atas segala bantuannya selama penulis mengurus tahap penyelesaian di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).
4. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Imron Rizki A, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih atas segala arahan dan masukan yang diberikan kepada penulis selama melakukan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. .
5. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI, selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) IAIN Bone. Terima kasih penulis haturkan kepada ibu, sebab telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Rosita, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Kelompok 1 IAIN Bone. Terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan ibu selama penulis aktif di bangku perkuliahan sampai penulis sampai ketahap sekarang ini.
7. Ibu Mardianah, S.Ag., M.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan beserta karyawan/karyawati perpustakaan IAIN Bone, terima kasih penulis ucapkan atas segala bantuan dan pelayaanannya terhadap penuli dan pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.

8. Seluruh dosen, asisten dosen dan segenap staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone terima kasih banyak atas segala bantuan dan arahnya kepada penulis atas informasi-informasi yang tidak diketahui oleh penulis.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabatku dan rekan-rekan angkatan 15 di Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) serta keluarga besar KSR PMI UNIT IAIN BONE dan KOPMA IAIN BONE yang selalu mengingatkan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta berbagai pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Semoga Allah *subhānahū wa ta'ālā* memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah *subhānahū wa ta'ālā* penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Watampone, 14 Januari 2022



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-15
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Kerangka Pikir	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16-44
A. Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>)	16
1. Pengertian Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>) dan Rumusan Negara Hukum Indonesia.....	16
a. Pengertian Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>)	16
b. Rumusan Negara Hukum Indonesia.....	17
2. Ciri-Ciri Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>)	19
a. Adanya Sistem Ketatanegaraan yang Sistematis	19
b. Hukum Sebagai Patokan Segala Bidang	20
c. Adanya Perlindungan dan Pengakuan Hak Asasi	

d.	Sistem Peradilan yang Tidak Memihak dan Memiliki Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum	20
e.	Adanya Pembagian Kekuasaan yang Jelas	21
f.	Adanya Peradilan Pidana dan Perdata.....	21
g.	Legalitas dalam Arti Hukum itu Sendiri	21
3.	Unsur-Unsur Negara Hukum dalam UUD Tahun 1945.....	22
a.	Bersumber pada Pancasila.....	22
b.	Sistem Konstitusi	22
c.	Kedaulatan Rakyat	23
d.	Persamaan dalam Hukum	23
e.	Kekuasaan Hakim yang Bebas.....	24
f.	Pembentukan Undang-Undang	25
B.	Pers.....	26
1.	Pengertian Pers.....	26
2.	Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peran Pers	28
a.	Asas Pers	28
b.	Fungsi Pers	29
c.	Hak Pers	31
d.	Kewajiban Pers.....	32
e.	Peran Pers.....	34
C.	Hakekat Kebebasan Pers	34
BAB III METODE PENELITIAN		45-47
A.	Metode Penelitian.....	45
1.	Jenis Penelitian	45
2.	Pendekatan Penelitian	45
3.	Bahan Hukum.....	45
a.	Bahan Hukum Primer.....	45
b.	Bahan Hukum Skunder	46
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48-94
A. Kebebasan Pers dalam Menyampaikan Informasi	48
B. Peranan Pers dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat.....	78
BAB V PENUTUP	95-96
A. Simpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍat	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Huruf Latin
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*, هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*, قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*, رمى : *ramā*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 32 kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun : Devi Alviana
NIM : 01154002
Judul Skripsi : *“Kebebasan Pers dalam Menyampaikan Informasi Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”*

Skripsi berjudul *“Kebebasan Pers dalam Menyampaikan Informasi Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”*. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana kebebasan pers dalam menyampaikan informasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 2. (2) Untuk mengetahui bagaimana peranan pers dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan pers Indonesia masih belum sepenuhnya bebas, dengan kata lain kebebasan pers Indonesia masih berada diposisi cukup bebas dengan poin 75,27% dan beberapa faktor yang menyebabkan pers Indonesia dikategorikan cukup bebas yakni kekerasan terhadap wartawan atau pers, adanya penyensoran, perusakan alat, pelarangan atau pengusiran, pemidanaan, teror, dan intimidasi ferbal oleh pejabat, serta penyerangan terhadap lalu lintas jaringan dikenal dengan istilah DDoS (*Distributed Denial of Service*), serta adanya beberapa peraturan yang menjadi ancaman bagi kebebasan pers yang bisa digunakan oleh para pejabat ataupun pihak yang merasa risih terhadap berita yang dimuat oleh pers untuk menjerat atau memidanakan pers. Kebebasan pers harus dijamin, karena pers memiliki peranan untuk menjaga kedaulatan rakyat atau masyarakat demokrasi. Seperti memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi baik itu politik, sosial dan ekonomi, menegakkan nilai dasar demokrasi, melakukan pengawasan atau menjadi anjing penggonggong yang bertugas menyuarakan nada-nada sumbang, mendorong terwujudnya HAM, dan sebagainya.

ABSTRACT

Name of Compiler : Devi Alviana
NIM : 01154002
Title : “Freedom of the Press in Conveying Information Based on
Article 2 of Law Number 40 of 1999 Concerning the Press”

This thesis entitled “Freedom of the Press in Conveying Information Based on Article 2 of Law Number 40 of 1999 Concerning the Press”. The aims of this research are (1) To find out how the press freedom in conveying information is viewed from Law Number 40 of 1999 Article 2. (2) To find out how the role of the press in realizing people’s sovereignty.

The type of research used by the author is normative legal research or library law research, namely research conducted by examining library materials or primary legal materials. The research method used by the author is a qualitative method with a normative juridical approach.

The results of this study indicate that Indonesian press freedom is still not completely free, in other words, Indonesian press freedom is still in a fairly free position with 75.27% points and several factors that cause the Indonesian press to be categorized as quite free, namely violence against journalists or the press, censorship, destruction of equipment, prohibition or expulsion, punishment, terror, and verbal intimidation by officials, as well as attacks on network traffic known as DDoS (Distributed Denial of Service), as well as the existence of several regulations that pose a threat to press freedom that can be used by journalists. officials or parties who feel uncomfortable with the news published by the press to ensnare or criminalize the press. Freedom of the press must be guaranteed, because the press has a role to maintain the sovereignty of the people or a democratic society. Such as fulfilling the people's right to know political, social and economic information, upholding the basic values of democracy, conducting surveillance or being a barking dog whose job is to voice discordant tones, encourage the realization of human rights, and so on.

ABSTRACT

اسم المؤلف: Devi Alviana

المعرف: 01154002

عنوان الرسالة: "حرية الصحافة في نقل المعلومات بناء على المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1999 بشأن الصحافة"

رسالة بعنوان "حرية الصحافة في نقل المعلومات بناء على المادة 2 من القانون رقم 40 لسنة 1999 بشأن الصحافة". الغرض من هذه الدراسة هو (1) معرفة كيفية النظر إلى حرية الصحافة في نقل المعلومات من القانون رقم 40 لعام 1999 المادة 2. (2) لمعرفة كيفية دور الصحافة في تحقيق سيادة الناس.

نوع البحث الذي استخدمه المؤلف هو البحث القانوني المعياري أو بحث قانون المكتبات ، أي البحث الذي يتم إجراؤه عن طريق فحص مواد المكتبة أو المواد القانونية الأولية. إن منهج البحث الذي استخدمه المؤلف أسلوب نوعي ذو منهج قانوني معياري.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن حرية الصحافة الإندونيسية لا تزال غير حرة تمامًا ، بمعنى آخر ، لا تزال حرية الصحافة الإندونيسية في وضع حر إلى حد ما بنسبة 75.27٪ نقطة والعديد من العوامل التي أدت إلى تصنيف الصحافة الإندونيسية على أنها حرة تمامًا ، وهي: العنف ضد الصحفيين أو الصحافة ، والرقابة ، وتدمير المعدات ، والحظر أو الطرد ، والعقاب ، والإرهاب ، والتخويف اللفظي من قبل المسؤولين ، فضلاً عن الهجمات على حركة مرور الشبكة المعروفة باسم DDoS (رفض الخدمة الموزعة) ، فضلاً عن وجود العديد من اللوائح التي تشكل تهديدًا لحرية الصحافة والتي يمكن أن يستخدمها الصحفيون أو المسؤولون أو الأطراف الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه الأخبار التي تنشرها الصحافة للإيقاع بالصحافة أو تجريمها. يجب ضمان حرية الصحافة لأن للصحافة دور في الحفاظ على سيادة الشعب أو المجتمع الديمقراطي. مثل الوفاء بحق الناس في معرفة المعلومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، والتمسك بالقيم الأساسية للديمقراطية ، وإجراء المراقبة أو أن تكون كلبًا ينبج وظيفته التعبير عن النغمة المتناقضة ، وتشجيع أعمال حقوق الإنسان ، وما إلى ذلك.